

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**

Dalam rangka mencapai target pembangunan Kota Kediri tahun 2018, Pemerintah Kota Kediri memperhatikan kondisi ekonomi daerah pada tahun berjalan. Kondisi ekonomi daerah yang kondusif akan mampu mendukung pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kediri perlu memperhatikan kondisi ekonomi daerah tahun 2017 dan perkiraan kondisi ekonomi tahun 2018.

### **3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018**

#### **a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi perekonomian nasional tahun 2017 diperkirakan cenderung kondusif, meskipun tidak sekuat realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 hingga 2012 lalu. Bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 akan berada pada kisaran 5 hingga 5,4%. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan ditopang oleh permintaan domestik. Adapun dalam jangka menengah, bank sentral memperkirakan perekonomian nasional akan tumbuh lebih tinggi. Hal ini ditopang oleh struktur perekonomian yang lebih kuat dan berkualitas.

Sedangkan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur khususnya pada Triwulan II/2016, pertumbuhannya mampu melebihi nasional dengan mencatatkan angka 5,62%, dibanding nasional yang hanya tumbuh 5,18% "year on year" (yoy). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II/2016 didominasi tiga lapangan usaha utama, yakni pengolahan, perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pertumbuhan ekonomi Jatim juga tercatat lebih besar dibanding tahun 2015 pada periode yang sama yang hanya

mampu tumbuh sebesar 5,23%. Sedangkan untuk Triwulan III/2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menurun 0,01%, dan mencatatkan angka sebesar 5,61% yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yang mencapai Rp.480,04 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.362,48 triliun. Menurut data BPS, pertumbuhan tersebut tetap didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 28,51%. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,10%, dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 18,10%.

Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2017 akan mencapai 5,6-5,7%. Bahkan BI memprediksi perekonomian Jawa Timur lebih tinggi lagi mencapai 6,1%, dengan syarat tanpa kendala transfer pemerintah pusat ke wilayah Jawa Timur seperti beberapa program pembangunan dan infrastruktur jalan. Selain itu, penyerapan produk Jawa Timur oleh tiga negara yang menjadi rekan kerja Jawa Timur seperti Jepang, Amerika, dan Tiongkok, volumenya bertambah, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk pencapaian target tersebut pemerintah bertumpu pada aktivitas investasi dengan mengandalkan penanaman modal baik dari pengusaha domestik maupun luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dalam menyederhanakan perizinan karena saat ini perizinan investasi masih melibatkan pemerintah daerah, antara lain seputar izin lingkungan, izin lokasi, dan izin prinsip.

Sementara itu, kondisi perekonomian Kota Kediri secara makro dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Daerah Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB saat ini menggunakan tahun dasar 2010 dengan menggunakan implementasi *System of National Account* (SNA) 2008 dan klasifikasi baku komoditi Indonesia (KBKI) 2014 revisi IV. Jumlah sektor yang sebelumnya 9 sektor yang didukung 39 sub sektor, saat ini menggunakan 17 kategori dengan 54 industri sebagai pendukungnya.

Perkembangan PDRB Kota Kediri berdasarkan metode perhitungan baru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
**PDRB Kota Kediri dan Peranan  
 PT. Gudang Garam (%)**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB adhb dengan PT. Gudang Garam (Milyar Rp)	72.304.126,0	79.859.259,4	87.704.419,5	97.444.507,4	106.931.764,1
PDRB adhb tanpa PT. Gudang Garam (Milyar Rp)	14.431.356,09	16.022.311,95	17.423.892,77	19.172.479,30	21.407.339,03
<b>Peranan PT GG (%)</b>	<b>80,04</b>	<b>79,94</b>	<b>80,13</b>	<b>80,32</b>	<b>79,98</b>
PDRB adhk dengan PT. Gudang Garam (Milyar Rp)	63.185.080,2	65.408.804,8	69.232.890,1	72.945.528,5	76.959.413,9
PDRB adhk tanpa PT. Gudang Garam (Milyar Rp)	13.252.673,55	14.241.045,46	14.925.697,72	15.740.738,51	16.719.010,78
<b>Peranan PT GG (%)</b>	<b>79,03</b>	<b>78,23</b>	<b>78,44</b>	<b>78,42</b>	<b>78,28</b>

\*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Kediri

Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri didominasi oleh PT. Gudang Garam Tbk, dengan kontribusi rata-rata diatas 75%. Peranan PT. Gudang Garam Tbk pada PDRB ADHB Kota Kediri tahun 2012–2016 berturut–turut sebesar 80,04%, 79,94%, 80,13%, 80,32% dan 79,98%.

Sedangkan, peranan PT. Gudang Garam Tbk terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri berdasarkan harga konstan lebih kecil dibandingkan atas dasar harga berlaku. Peranan PT. Gudang Garam Tbk terhadap PDRB ADHK terus berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagai berikut: tahun 2012 sebesar 79,03%; turun menjadi 78,23% pada tahun 2013; kemudian meningkat menjadi 78,44% pada tahun 2014, dan turun lagi menjadi 78,42% pada tahun 2015 dan menjadi 78,28% pada tahun 2016. Penurunan peranan PT. Gudang Garam Tbk perlu terus dilakukan agar tingkat ketergantungan semakin kecil.

Berdasarkan lapangan usaha, peranan masing-masing kategori pembentuk PDRB Kota Kediri ADHB tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
**PDRB Seri 2010 ADHB menurut lapangan usaha  
(Juta Rupiah) Tahun 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	202.542,7	219.585,7	243.510,1	272.386,0	286.149,4
B. Pertambangan dan Penggalian	35,5	36,7	37,7	37,4	38,6
C. Industri Pengolahan	59.017.503,1	65.092.032,0	71.662.728,7	79.832.071,5	87.295.912,0
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6.918,5	6.887,0	7.159,5	7.921,2	8.473,2
E. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah	15.237,6	16.821,3	17.420,7	18.506,6	20.133,4
F. Konstruksi	1.325.110,9	1.456.974,6	1.625.572,1	1.781.351,4	1.974.788,1
G. Perdagangan Besar dan Eceran	6.834.184,3	7.583.423,3	8.070.372,5	8.783.151,0	9.865.915,4
H. Transportasi dan Pergudangan	264.702,7	301.560,2	349.099,7	392.522,8	435.378,3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	959.201,3	1.081.593,9	1.255.404,0	1.433.064,1	1.642.011,9
J. Informasi dan Komunikasi	1.423.919,5	1.591.579,2	1.706.969,3	1.855.185,8	2.057.198,7
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	647.915,8	735.002,3	823.272,1	913.864,2	1.004.528,1
L. Real Estate	302.591,1	331.867,9	357.386,7	400.663,2	438.034,1
M.N. Jasa Perusahaan	135.241,2	152.564,0	166.947,3	182.782,1	204.112,9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	300.264,8	314.784,2	320.014,0	339.355,8	368.554,3
P. Jasa Pendidikan	528.209,4	602.319,5	674.646,9	752.989,4	813.267,5
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107.879,3	121.046,6	140.837,4	156.552,8	171.334,7
R.S.T.U. Jasa Lainnya	232.668,4	251.181,0	283.040,8	322.101,9	345.933,7
<b>PRODUK DOMESTIC REGIONAL BRUTO (PDRB)</b>	<b>72.304.126,0</b>	<b>79.859.259,4</b>	<b>87.704.419,5</b>	<b>97.444.507,4</b>	<b>106.931.764,1</b>

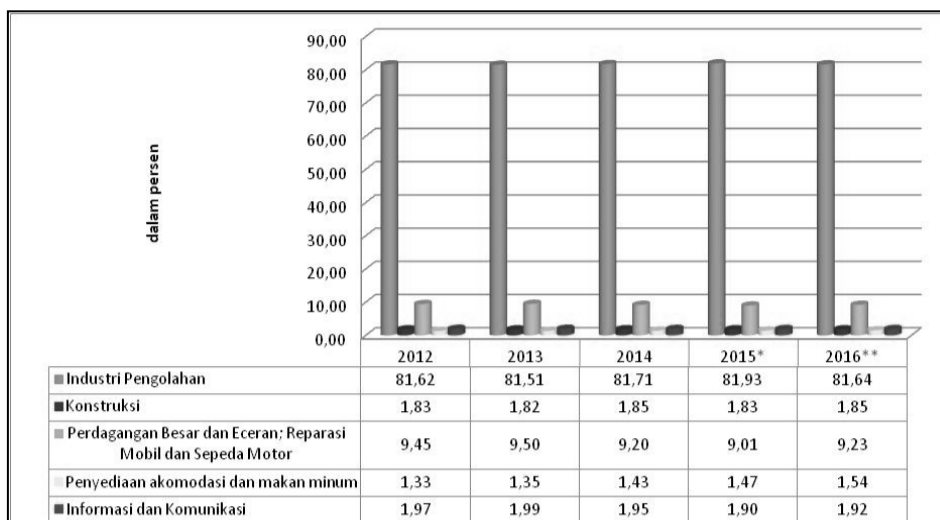
\*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Kediri

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri didominasi oleh 5 lapangan usaha, perkembangan kontribusi dari kelima lapangan usaha dominan tersebut tersaji pada grafik berikut :

Grafik 3.1  
**Perkembangan Kontribusi Lima Sektor Dominan  
 Dalam Struktur Perekonomian Kota Kediri  
 Tahun 2012 – 2016 (%)**



\*) angka sementara

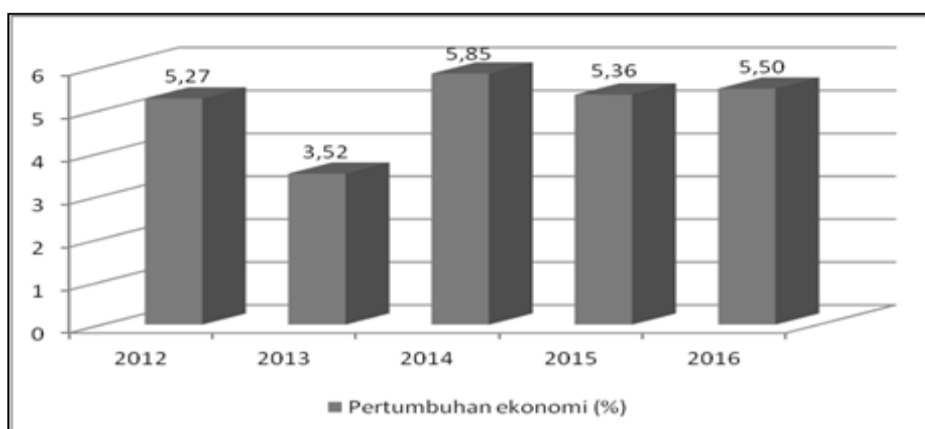
\*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Kediri

Kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri berasal dari sektor industri pengolahan, yaitu berkisar di atas 81% sejak tahun 2012. Kontribusi terbesar kedua disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dengan rata-rata di atas 9,00% selama lima tahun terakhir. Sektor informasi dan komunikasi menempati kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Kota Kediri: yaitu berturut-turut sebesar 1,97% (2012), 1,99% (2013), 1,95% (2014), 1,90 (2015) dan 1,92 (2016). Sektor konstruksi dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menempati urutan keempat dan kelima dalam mendukung struktur perekonomian Kota Kediri.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi (berdasarkan PDRB ADHK), laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri pada Tahun 2016 mencapai 5,50 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2012 sampai 2016 berdasarkan PDRB ADHK ditunjukkan oleh tabel berikut :

Grafik 3.3  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri  
Tahun 2012 – 2016 (%)**



Sumber : BPS Kota Kediri

Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan 17 lapangan usaha. Secara lengkap pertumbuhan ekonomi Kota Kediri masing-masing lapangan usaha, sebagai berikut :

Tabel 3.3  
**Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
Kota Kediri Tahun 2012-2016**

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015*	TAHUN 2016**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,42	2,20	1,78	2,53	1,35
2.	Pertamb. & Penggalian	0,92	0,74	-0,98	-0,98	-0,96
3.	Industri pengolahan	4,35	2,57	6,13	5,39	5,36
4.	Pengadaan Listrik & Gas	8,40	4,50	2,64	0,67	1,66
5.	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah	5,09	6,68	0,83	3,43	3,53
6.	Konstruksi	8,04	8,22	3,38	2,81	4,01
7.	Perdagangan Besar Eceran	10,56	6,56	3,57	4,95	6,04
8.	Transportasi & Pergudangan	4,16	8,06	7,99	5,47	6,12
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5,29	7,17	7,61	7,34	7,94
10.	Informasi & Komunikasi	13,88	11,74	7,22	7,22	7,92
11.	Jasa Keuangan & Asuransi	8,93	9,90	5,80	4,82	4,91
12.	Real Estate	5,08	6,95	6,98	5,28	5,88
13.	Jasa Perusahaan	6,35	7,09	8,24	6,56	6,46
14.	Adm. Pemerintahan, Pertahanan	3,41	1,95	0,20	3,42	2,92
15.	Jasa Pendidikan	7,69	8,11	7,16	6,78	6,28
16.	Jasa Kesehatan & Keg. Sosial	8,76	9,45	7,88	7,36	6,91
17.	Jasa Lainnya	3,93	6,77	4,89	5,20	5,10
	<b>PDRB ADHK</b>	<b>5,27</b>	<b>3,52</b>	<b>5,85</b>	<b>5,36</b>	<b>5,50</b>

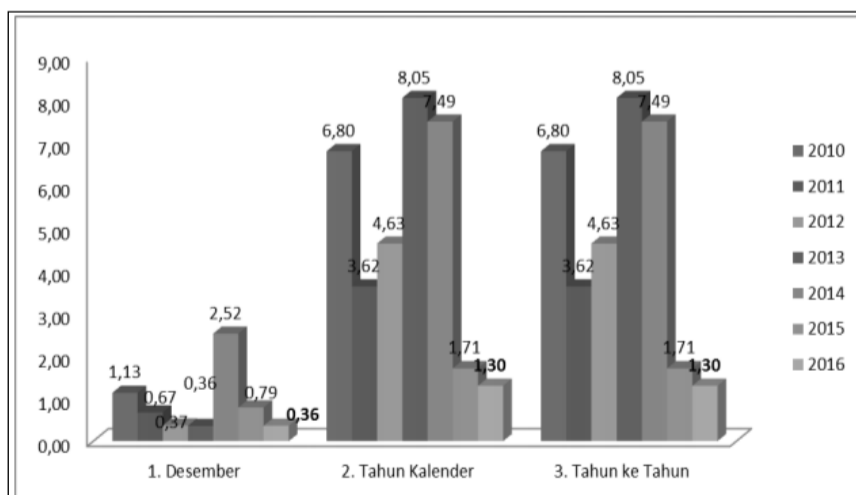
Sumber : BPS Kota Kediri

Selama tahun 2012 sampai dengan 2016 seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB di Kota Kediri mengalami kenaikan secara bervariasi, kecuali sektor pertambangan dan penggalan yang mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Kota Kediri yang melarang beroperasinya penambangan pasir di Sungai Brantas.

**b. Inflasi**

Konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidklancaran distribusi barang merupakan faktor penyebab terjadinya inflasi dimana harga-harga secara umum meningkat secara terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi menjadi salah satu indikator stabilitas perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data inflasi selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kota Kediri tergolong relatif stabil. Rata-rata laju inflasi di Kota Kediri tidak melebihi dua digit. Bahkan inflasi Kota Kediri pada tahun 2016 sebesar 1,30%, lebih rendah dari inflasi Nasional yang sebesar 3,02%, maupun inflasi Jawa Timur yang sebesar 2,74%. Berikut ini perbandingan laju inflasi tahunan di Kota Kediri periode 2011-2016.

Grafik 3.4  
**Laju Inflasi Tahunan Kota Kediri Periode  
 Tahun 2011 – 2016**



Sumber Data : BPS Kota Kediri

Inflasi kumulatif Kota Kediri pada tahun 2016 sebesar 1,30%. Sedangkan apabila dilihat selama kurun waktu enam tahun terakhir, laju inflasi kumulatif tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,05%, diikuti tahun 2014 sebesar 7,49%. Inflasi kumulatif Kota Kediri terendah sepanjang kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,30%.

Kestabilan harga yang tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya mewujudkan stabilitas harga ini membutuhkan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Koordinasi kebijakan yang tepat dalam menentukan waktu penyesuaian harga-harga yang diatur pemerintah seperti penyesuaian harga BBM dan tarif dilakukan secara tepat sehingga dampak lanjutan atas kebijakan tersebut tidak menimbulkan tekanan yang dalam.

Lebih jauh diperlukan sinergi kebijakan makro ekonomi yang mencakup kebijakan fiskal, moneter dan sektoral untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Peran kebijakan fiskal dan berbagai kebijakan sektoral, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting karena inflasi banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran. Keberhasilan dalam mencapai inflasi yang rendah juga tidak terlepas dari peran aktif anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri yang berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi serta menindaklanjuti fenomena yang terjadi di lapangan seperti melakukan pemantauan inflasi secara periodik, memantau ketersediaan komoditas pada momen-momen khusus, melaksanakan operasi pasar, mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan dan melakukan langkah-langkah antisipatif-preventif dalam rangka mengendalikan kenaikan harga dan inflasi di Kota Kediri.

Berbagai indikator ekonomi yang telah disajikan menunjukkan bahwa secara keseluruhan perekonomian Kota Kediri sampai dengan tahun 2016 dalam kondisi yang cukup kondusif. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil.



Dengan demikian, Kota Kediri termasuk wilayah yang berpotensi sebagai tempat investasi bagi para investor baik dari dalam maupun luar wilayah.

Perkembangan kondisi ekonomi makro tersebut didukung dengan indikator makro lainnya, sebagai berikut :

Tabel 3.4  
**Perkembangan Indikator Makro Lainnya  
Kota Kediri Tahun 2012-2016**

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI				
		TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015*	TAHUN 2016**
1.	Jumlah Penduduk Miskin (%)	22.100 (8,14%)	22.700 (8,23%)	22.130 (7,95%)	23.770 (8,51%)	data belum tersedia
2.	Tingkat Pengangguran (terbuka)	7,85%	8,00 %	7,66%	8,64%	7,66%
3.	Besaran IPM (metode penghitungan baru)	73,66	74,18	74,62	75,67	76,33

Ket : \*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

Sumber Data : BPS Kota Kediri, KER Prop. Jatim, Barenlitbang Kota Kediri (diolah)

Perkembangan indikator makro lainnya (jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka) mengalami fluktuasi selama tahun 2012-2016, sedangkan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kediri dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Kondisi perekonomian nasional masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Hal ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Tantangan dari sisi internal diantaranya tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kerentanan di mana penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan masih rentan terhadap guncangan ekonomi, kesenjangan ditandai dengan tingkat rasio gini yang masih cukup tinggi yaitu di angka 0,39, tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,5% dan kondisi fiskal yang masih dihadapkan pada persoalan belum optimalnya penerimaan negara dan belanja yang masih harus dipertajam.

Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi nasional setidaknya dihadapkan dengan empat tantangan yaitu, perlambatan ekonomi global, masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca Brexit, perubahan politik di Amerika Serikat setelah terpilihnya presiden baru yang diyakini akan berdampak luas dan harga komoditas yang masih belum pulih sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sampai 2021 ditargetkan tercapai pada kisaran 5,9 hingga 6,3% yang ditopang oleh inflasi yang rendah. Selain itu, defisit transaksi berjalan juga akan berada pada lintasan yang menurun. Bank sentral memprediksi defisit transaksi berjalan akan berada di bawah 3% dari PDB. Pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%-6,1% dan inflasi sebesar 4,0%. Sementara itu, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,61%-5,96%.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri telah dapat disejajarkan dengan target nasional dan Jawa Timur. Kondisi ekonomi makro yang kondusif akan dapat mendukung pencapaian target kinerja pembangunan tahun 2018. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi makro sampai tahun 2016 dan prediksi sampai akhir tahun 2017, kebijakan ekonomi pemerintah pusat, serta target ekonomi makro Nasional dan Jawa Timur, maka Pemerintah Kota Kediri menargetkan ekonomi makro tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,9%. Hal ini didukung dengan kebijakan mempermudah investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
2. Inflasi Kota Kediri tahun 2018 ditargetkan sebesar 3%. Hal ini mempertimbangkan perkembangan inflasi Kota Kediri yang cukup rendah dan stabil selama dua tahun terakhir serta kondisi ekonomi yang cukup stabil.

### **3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kondisi ekonomi Kota Kediri tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi ekonomi Jawa Timur maupun Nasional. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi Kota Kediri tahun 2018 harus sinergi dengan kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.

Adapun arah kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Makro Ekonomi
  - 1). Mendorong otoritas moneter untuk mengevaluasi tingkat suku bunga bank sehingga dapat menggerakkan sector riil;
  - 2). Menjaga stabilitas ekonomi makro daerah, terutama inflasi, melalui optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
  
- b. Kebijakan Mikro Ekonomi
  - 1). Menyediakan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, sarana-prasana perdagangan, serta infrastruktur lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi;
  - 2). Meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi dalam struktur perekonomian di Kota Kediri. Upaya peningkatan peran usaha mikro dan koperasi dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pengelolaan usaha mikro dan koperasi, memperluas jaringan akses permodalan, serta memperluas pasar bagi usaha mikro;
  - 3). Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil menengah. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi kewenangan provinsi;
  - 4). Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran PD BPR dalam mempermudah akses permodalan bagi usaha mikro, kecil maupun menengah, serta merevitalisasi PD pasar untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat;

- 5). Meningkatkan investasi di Kota Kediri. Peningkatan investasi akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja yang menganggur dan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk menarik minat investor, pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah perijinan dan mendorong stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif untuk berusaha;
- 6). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia siap kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja secara mandiri atau bekerjasama dengan dunia usaha dan lembaga-lembaga yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.

#### **3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek pengelolaan pendapatan daerah, aspek pengelolaan belanja daerah dan aspek pengelolaan pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Kediri untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019, sebagai berikut :

### **3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan/optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dianggarkan berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2018, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Meningkatkan sarana prasarana dan tata kelola pendapatan;
3. Mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan untuk mendanai program prioritas;
4. Mengoptimalkan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah, antara lain :

1. Melaksanakan pendataan untuk menjaring wajib pajak/retribusi baru;
2. Melaksanakan tata kelola pemungutan yang berorientasi pada sistem pembayaran pajak/retribusi secara non tunai;
3. Meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak/retribusi dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan;
4. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi daerah;
5. Melaksanakan penagihan secara langsung kepada wajib pajak/retribusi daerah;

6. Penerapan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan dan peningkatan PAD;
7. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur;
8. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pajak/retribusi daerah;
9. Meningkatkan sarana prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD;
10. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka peningkatan terhadap PAD.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Kediri tahun 2018 sebesar Rp.1.106.791.182.892,17 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.210.060.224.759,17; Dana Perimbangan sebesar Rp.791.685.337.837,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.105.045.620.296,00. Realisasi dan proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018, sebagai berikut :

Tabel 3.5  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri  
Tahun 2015-2018**

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI	REALISASI	TARGET	PROYEKSI
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
-	Pajak Daerah	70.437.104.843,27	87.639.179.627,82	75.432.321.913,00	80.013.325.000,00
-	Retribusi Daerah	9.445.300.595,00	9.989.929.184,67	10.240.938.750,00	10.538.201.865,00
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	997.859.588,73	1.517.999.708,70	1.816.023.075,62	1.861.389.411,17
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	141.046.868.583,59	139.171.206.987,22	114.819.047.509,00	117.647.308.483,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>221.927.133.610,59</b>	<b>238.318.315.508,41</b>	<b>202.308.331.247,62</b>	<b>210.060.224.759,17</b>

### 1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri Tahun 2016 sebesar Rp.238.318.315.508,41 sedangkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp.221.927.133.610,59 sehingga terdapat *kenaikan* sebesar 6,88%. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar Rp. 210.060.224.759,17 jika

dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar Rp.202.308.331.247,62 mengalami *kenaikan* sebesar 3,83%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

### 1.1 Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.87.639.179.627,82 atau *naik* 24,42% dibandingkan realisasi tahun 2015 yaitu sebesar Rp.70.437.104.843,27. Proyeksi pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp.80.013.325.000,00 atau *naik* 6,07% dari target tahun 2017 sebesar Rp.75.432.321.913,00. Kontribusi terbesar dari pajak daerah tahun 2017 adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebesar Rp.23.350.000.000,00 atau 29,18% dari seluruh total pendapatan pajak daerah.

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2015-2018 sesuai tabel berikut ini :

Tabel 3.6  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun 2015-2018**

NO	Jenis Pajak	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1.	Pajak Hotel	3.486.730.847,00	4.103.756.899,00	3.713.500.000,00	4.093.960.000,00
2.	Pajak Restoran	7.127.063.660,41	8.984.657.863,72	7.236.900.000,00	8.975.000.000,00
3.	Pajak Hiburan	1.239.453.839,00	1.184.500.685,00	1.100.921.913,00	1.159.365.000,00
4.	Pajak Reklame	1.652.593.505,00	1.928.271.095,00	1.887.000.000,00	1.937.000.000,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.756.258.328,00	22.811.700.424,00	22.694.000.000,00	22.798.000.000,00
6.	Pajak Parkir	515.898.219,00	1.375.727.096,00	900.000.000,00	1.100.000.000,00
7.	Pajak Air Tanah	540.257.643,00	633.947.099,00	550.000.000,00	600.000.000,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan	19.923.333.229,00	23.361.791.012,01	22.850.000.000,00	23.350.000.000,00
9.	BPHTB	14.195.515.572,86	23.254.827.454,09	14.500.000.000,00	16.000.000.000,00
<b>J U M L A H</b>		<b>70.437.104.843,27</b>	<b>87.639.179.627,82</b>	<b>75.432.321.913,00</b>	<b>80.013.325.000,00</b>

## 1.2 Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan dari retribusi daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp.9.989.929.184,67, mengalami *kenaikan* 5,77% dibanding tahun 2015 yaitu sebesar Rp.9.445.300.595,00. Sedangkan untuk proyeksi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp.10.538.201.865,00 mengalami *kenaikan* sebesar 2,90% dari target retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp.10.240.938.750,00.

Realisasi dan proyeksi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2015-2018 sesuai tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2015-2018**

No	Jenis Retribusi	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	730.456.000,00	819.170.500,00	650.000.000,00	650.000.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	652.107.000,00	845.933.000,00	668.982.300,00	723.431.415,00
3.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat	28.554.000,00	26.464.500,00	34.360.200,00	45.000.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.959.204.000,00	3.926.936.500,00	4.301.824.000,00	4.277.500.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	649.232.000,00	676.045.000,00	655.000.000,00	655.000.000,00
6.	Retribusi Pengendalian Menara	218.865.437,00	-	-	-
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	156.658.169,00	286.745.600,00	590.600.000,00	715.985.000,00
8.	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan	480.470.365,00	501.284.582,67	480.500.000,00	500.000.000,00
9.	Retribusi Terminal	314.164.750,00	342.224.800,00	294.286.750,00	262.354.250,00
10.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	97.818.000,00	119.349.000,00	170.703.000,00	189.595.000,00
11.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.620.000,00	2.000.000,00	11.356.300,00	11.356.000,00
12.	Retribusi Rumah Potong Hewan	171.850.000,00	172.250.000,00	180.475.000,00	180.475.000,00
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	685.479.000,00	732.845.000,00	714.301.000,00	735.455.000,00
14.	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	5.195.600,00	5.020.000,00	21.475.200,00	21.475.200,00
15.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	710.277.360,00	783.533.631,00	750.000.000,00	808.500.000,00



No	Jenis Retribusi	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
16.	Retribusi ijin tempat berjualan minuman beralkohol	70.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	70.000.000,00
17.	Retribusi Ijin Gangguan/ keramaian	509.948.914,00	697.608.071,00	688.675.000,00	688.675.000,00
18.	Retribusi Ijin Trayek	3.400.000,00	2.519.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
<b>J U M L A H</b>		<b>9.445.300.595,00</b>	<b>9.989.929.184,67</b>	<b>10.240.938.750,00</b>	<b>10.538.201.865,00</b>

### 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2016 sebesar Rp.1.517.999.708,70 mengalami peningkatan sebesar 34,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2015 yaitu Rp.997.859.588,73. Untuk tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 1.861.389.411,17 atau mengalami kenaikan dari target tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.816.023.075,62.

Realisasi serta proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai dengan tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8  
**Realisasi dan Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2015-2018**

No	Jenis Investasi/ Nama Perusahaan	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1.	PDAM	286.559.992,95	371.319.989,70	495.797.664,45	445.000.000,00
2.	BPR Kota Kediri	92.479.288,00	-	355.700.000,00	450.000.000,00
3.	Bank Jatim	594.758.307,78	610.955.739,00	629.284.411,17	629.284.411,17
4.	BPR KURK Jatim	24.062.000,00	14.408.000,00	10.241.000,00	12.105.000,00
5.	PD Pasar	-	521.315.980,00	325.000.000,00	325.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>997.859.588,73</b>	<b>1.517.999.708,70</b>	<b>1.816.023.075,62</b>	<b>1.861.389.411,17</b>

Adapun kontribusi terbesar dari jenis penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2017 adalah Bagian laba atau penyertaan modal pada Bank Jatim sebesar Rp. 629.284.411,17 atau 33,80% dari total penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

#### 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Komponen dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan retribusi, penerimaan lain-lain, Pendapatan BLUD, Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa, dan serta hasil pengelolaan dana bergulir, Pendapatan dana kapitasi JKN FKTP Pukesmas, Lain-lain PAD yang Sah lainnya, Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa, Pendapatan BPJS Non Kapitasi, Pendapatan denda keterlambatan pengurusan dokumen.

Untuk Realisasi dan proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2015-2018 sesuai tabel berikut ini :

Tabel 3.9  
**Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2015-2108**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
1.	Hasil penjualan aset daerah yang tdk dipisahkan	61.250.000,00	43.350.000,00	40.350.000,00	41.350.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	6.493.596.279,84	10.739.585.645,27	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00
3.	Pendapatan Bunga Deposito	29.730.794.520,14	17.367.890.780,79	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	2.550.000,00	3.912.500,00	-	-
5.	Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	117.390.441,00	285.444.109,00	-	-
6.	Pendapatan denda pajak	420.799.082,05	368.192.423,00	-	-
7.	Pendapatan Denda Retribusi	150.861.554,00	148.077.869,00	140.000.000,00	140.000.000,00
8.	Pendapatan BLUD	88.720.708.956,88	93.598.661.683,00	93.940.000.000,00	95.448.623.663,00
9.	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	306.219.624,51	151.921.882,98	250.000.000,00	250.000.000,00
10.	Pendapatan dana kapitasi JKN FKTP Pukesmas	6.084.745.000,00	7.062.840.000,00	6.919.347.600,00	7.854.269.820,00
11.	Lain-lain PAD yang Sah lainnya	3.898.078.409,96	2.450.445.269,99	1.349.065.000,00	1.349.065.000,00
12.	Hasil lelang sewa bekas tanah kas desa	4.427.528.763,98	6.489.784.050,00	4.380.284.909,00	5.000.000.000,00
13.	Pendapatan BPJS Non Kapitasi	545.175.951,23	371.898.000,00	400.000.000,00	664.000.000,00
14.	Pendapatan denda keterlambatan pengurusan dokumen	87.170.000,00	86.950.000,00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>141.046.868.583,59</b>	<b>139.171.206.987,22</b>	<b>114.819.047.509,00</b>	<b>117.647.308.483,00</b>

Untuk realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2016 sebesar Rp.139.171.206.987,22 atau turun sebesar 1,33% dari realisasi tahun 2015 yaitu sebesar Rp.141.046.868.583,59. Sedangkan proyeksi tahun 2018 sebesar Rp117.647.308.483,00 atau mengalami *kenaikan* sebesar 2,46% dari target tahun 2017 sebesar Rp.114.819.047.509,00.

## 2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN serta dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dan bersifat transfer. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan pemerintahan daerah, serta antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi dana perimbangan tahun 2016 sebesar Rp.842.341.149.826,00 mengalami *kenaikan* sebesar 8,82% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp.774.087.250.166,00. Sedangkan untuk proyeksi jumlah penerimaan dana perimbangan tahun 2018 sebesar Rp.791.685.337.837,00 jika dibanding target tahun 2017 sebesar Rp.872.386.631.007,00 mengalami *penurunan* sebesar 9,25% atau Rp.80.701.293.170,00.

Realisasi dan proyeksi Dana Perimbangan tahun 2015-2018 sesuai tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10  
**Realisasi dan Proyeksi Dana Perimbangan  
Tahun 2015-2018**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
<b>1</b>	<b>Dana Perimbangan</b>				
-	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	112.202.429.166,00	125.649.030.826,00	113.696.837.837,00	111.673.771.837,00
-	Dana Alokasi Umum	634.461.169.000,00	617.780.644.000,00	640.152.240.170,00	617.780.644.000,00

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018
-	Dana Alokasi Khusus	27.423.652.000,00	98.911.475.000,00	118.537.553.000,00	62.230.922.000,00
	<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>774.087.250.166,00</b>	<b>842.341.149.826,00</b>	<b>872.386.631.007,00</b>	<b>791.685.337.837,00</b>

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 sebesar Rp.99.261.373.737,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp.231.971.211.926,00 mengalami *penurunan* sebesar 57,21%. Untuk proyeksi sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2018 sebesar Rp.105.045.620.296,00 jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu Rp.77.645.207.000,00 mengalami *peningkatan* sebesar 35,29%. Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11  
**Realisasi dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
 Pada tahun 2015 - 2018**

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1.	Pendapatan Hibah				27.345.620.296,00
2.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	72.682.839.926,00	79.760.622.737,00	70.145.207.000,00	70.200.000.000,00
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	115.436.169.000,00	439.121.000,00	-	-
4.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	43.852.203.000,00	14.061.630.000,00	-	-
5.	Dana Insentif Daerah	-	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>231.971.211.926,00</b>	<b>99.261.373.737,00</b>	<b>77.645.207.000,00</b>	<b>105.045.620.296,00</b>

#### 3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja Tidak Langsung dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai

program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kebijakan belanja daerah Kota Kediri tahun 2018, sebagai berikut :

1. Belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Belanja daerah diprioritaskan pada pencapaian target prioritas pembangunan, yaitu :
  - a). Pendidikan;
  - b). Kesehatan;
  - c). Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar masyarakat;
  - d). Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik prasarana, sosial dan ekonomi masyarakat;
  - e). Penataan Kota yang Ramah Lingkungan dan berbasis Ekologi;
  - f). Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan;
  - g). Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, serta reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik;
  - h). Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - i). Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda, olah raga, seni dan budaya.
3. Pengalokasikan/penganggaran Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana-prasarana perdagangan.
5. Belanja tidak langsung dialokasikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Belanja daerah Kota Kediri tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.1.369.426.658.418,33 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp.584.343.254.882,33 dan Belanja Langsung Rp.785.083.403.536,00.

Rincian Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai dialokasikan untuk gaji pegawai, anggota serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan KDH/WKDH, dengan memperhatikan kenaikan gaji, tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tunjangan baik untuk ASN maupun DPRD.

Pada tahun 2017 target belanja pegawai sebesar Rp.446.127.515.000,00. Sedangkan proyeksi belanja pegawai tahun 2018 yaitu Rp.462.197.173.980.33.

### **2. Belanja Hibah**

Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan untuk mendukung terhadap pelaksanaan urusan wajib maupun pilihan serta untuk mengantisipasi terjadinya resiko sosial. Belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan peraturan kepala daerah tentang hibah dan bansos.

Target belanja hibah tahun 2017 sebesar Rp.33.687.629.250,00 sedangkan proyeksi tahun 2018 sebesar Rp.50.193.487.150,00.

### 3. Belanja Bantuan Sosial

Target belanja bantuan sosial tahun 2017 sebesar Rp.32.051.299.350,00. Untuk tahun 2018 belanja bantuan sosial di proyeksikan sebesar Rp.66.225.533.077,00.

### 4. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan tahun 2018 dialokasikan untuk partai politik dengan besaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tahun 2017 target Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.727.060.675,00 dan diproyeksikan sebesar Rp.727.060.675,00 pada tahun 2018.

### 5. Belanja Tidak Terduga

Dalam rangka mengantisipasi kejadian yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam program dan kegiatan tahun 2018, Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang. Target belanja tidak terduga tahun 2017 sebesar Rp.6.300.000.000,00 sedangkan proyeksi tahun 2018 sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015-2018 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.12  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung  
Pada tahun 2015 - 2018**

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
2.1.1	Belanja Pegawai	581.716.043.591,72	503.230.970.483,54	446.127.515.000,00	462.197.173.980,33
2.1.4	Belanja Hibah	24.962.821.000,00	29.589.010.000,00	33.687.629.250,00	50.193.487.150,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.252.261.448,00	27.517.848.901,39	32.051.299.350,00	66.225.533.077,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	583.514.792,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	705.014.555,00	6.300.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>528.677.096.314,81</b>	<b>561.769.904.614,93</b>	<b>518.893.504.275,00</b>	<b>584.343.254.882,33</b>

Didorong oleh keterbatasan pembiayaan pembangunan di Kota Kediri, maka dalam pembiayaan penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema : (1). Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan; (2). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah; serta (3). kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional. Adapun kebijakan umum kerjasama pembiayaan pembangunan antara lain :

1. Kebijakan umum kerjasama antara Pemerintah dan Swasta (*public private partnership*) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah;
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan;



3. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

### 3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah.

Realisasi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Kediri Tahun 2015-2018, sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 3.13  
**Realisasi Dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2018**

NO	JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran seblumnya	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	210.664.334.463,38	272.635.475.526,16
<b>J U M L A H</b>		<b>435.429.158.907,04</b>	<b>535.711.940.751,80</b>	<b>210.664.334.463,38</b>	<b>272.635.475.526,16</b>

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

Tabel 3.14  
**Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2018**

NO	JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1.	Penyertaan modal (investasi) daerah	7.000.000.000,00	-	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
<b>J U M L A H</b>		<b>7.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>

Sumber : BPPKAD Kota Kediri

### 3.5 Rekapitulasi Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Daerah

Dalam rangka menetapkan proyeksi pendanaan tahun 2018, maka perlu memperhatikan realisasi anggaran tahun 2015-2016 serta target tahun 2017. Kerangka pendanaan tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15  
Realisasi Dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2018

NO	JENIS PENDAPATAN	REALISASI TAHUN 2015	REALISASI TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.227.985.595.702,59</b>	<b>1.179.920.839.071,41</b>	<b>1.152.340.169.254,62</b>	<b>1.106.791.182.892,17</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>221.927.133.610,59</b>	<b>238.318.315.508,41</b>	<b>202.308.331.247,62</b>	<b>210.060.224.759,17</b>
1.1.1	Pajak Daerah	70.437.104.843,27	87.639.179.623,82	75.432.321.913,00	80.013.325.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	9.445.300.595,00	9.989.929.184,67	10.240.938.750,00	10.538.201.865,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	997.859.588,73	1.517.999.708,70	1.816.023.075,62	1.861.389.411,17
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	141.046.868.583,59	139.171.206.987,22	114.819.047.509,00	117.647.308.483,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>774.087.250.166,00</b>	<b>842.341.149.826,00</b>	<b>872.386.631.007,00</b>	<b>791.685.337.837,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	112.202.429.166,00	125.649.030.826,00	113.696.837.837,00	111.673.771.837,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	634.461.169.000,00	617.780.644.000,00	640.152.240.170,00	617.780.644.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.423.652.000,00	98.911.475.000,00	118.537.553.000,00	62.230.922.000,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>231.971.211.926,00</b>	<b>99.261.373.737,00</b>	<b>77.645.207.000,00</b>	<b>105.045.620.296,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah				27.345.620.296,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	72.682.839.926,00	79.760.622.737,00	70.145.207.000,00	70.200.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	115.436.169.000,00	439.121.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	43.852.203.000,00	14.061.630.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Dana Insentif Daerah	0,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.120.702.813.857,83</b>	<b>1.484.725.405.962,16</b>	<b>1.343.004.503.718,00</b>	<b>1.369.426.658.418,33</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>528.261.178.165,07</b>	<b>561.753.904.614,90</b>	<b>518.893.504.275,00</b>	<b>584.343.254.882,33</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	446.127.515.000,00	462.197.173.980,33
2.1.4	Belanja Hibah	21.711.780.000,00	29.589.010.000,00	33.687.629.250,00	50.193.487.150,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15,202,566,312,42	27.517.848.901,36	32.051.299.350,00	66.225.533.077,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	116.985.254,00	705.014.555,00	6.300.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>592.441.635.692,76</b>	<b>922.971.501.347,26</b>	<b>824.110.999.443,00</b>	<b>785.083.403.536,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>107.282.781.844,76</b>	<b>(304.804.566.890,75)</b>	<b>(190.664.334.463,38)</b>	<b>(262.635.475.526,16)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>428.429.158.907,00</b>	<b>535.711.940.751,80</b>	<b>190.664.334.463,38</b>	<b>262.635.475.526,16</b>
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>435.429.158.907,04</b>	<b>535.711.940.751,80</b>	<b>210.664.334.463,38</b>	<b>272.635.475.526,16</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	210.664.334.463,38	272.635.475.526,16
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.00,00</b>
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	7.000.000.000,00	0,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.2	Pembayaran pokok utang		0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**  
**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**